



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2024;

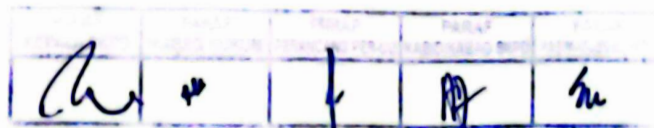
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PURAP KEPACI BKPD	PURAP KABAG HUKUM	PURAP TETANG	PURAP KABAG HUKUM	PURAP KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);

A grid of five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and appear to be initials or names of officials.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

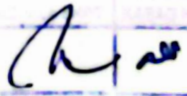



Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Selanjutnya disebut Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.
8. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta metode kerja.

9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
10. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data, dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan merupakan acuan, sasaran, dan prioritas Pengawasan dalam pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan Pengawasan terhadap:
 - a. peningkatan SKPD/unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut;

NO	NAMA	JABATAN	REVISI	REVISI	REVISI
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan serta Pemeriksaan investigasi dengan tujuan tertentu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah:

- a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

BAB V ASPEK PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan PKPT meliputi:

- a. penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia;
- b. kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);



- c. kebijakan kedudukan keuangan ketua/wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
- d. pengelola pendapatan asli Daerah, dana alokasi umum, dana perimbangan pusat/daerah, dan dana bagi hasil;
- e. hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah;
- f. realisasi pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah Daerah;
- g. tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- h. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- j. kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB VI RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup Pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - b. aspek pengelolaan keuangan;
 - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. aspek pengelolaan barang Daerah disesuaikan dengan harga pasar.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup:
 - a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
 - c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
 - d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan adalah:
 - a. penataan SKPD meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan

PANGKIP KOTA BANGKALAYA	PANGKIP KABUPATEN BANGKALAYA	PANGKIP KABUPATEN BANGKALAYA	PANGKIP KABUPATEN BANGKALAYA	PANGKIP KABUPATEN BANGKALAYA
				

- keangkatan, Pendidikan dan latihan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap keputusan menteri dalam negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap keputusan menteri dalam negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
 - d. pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan sumber daya manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan pegawai PPPK, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan keangkatan, Pendidikan, dan latihan dalam pengangkatan jabatan struktural;
 - g. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan Daerah;
 - h. pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - i. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII OBJEK PENGAWASAN

Pasal 8

Objek Pengawasan meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. dinas;
- d. badan;
- e. kantor kecamatan;
- f. kelurahan;
- g. desa;
- h. sekolah; dan
- i. badan layanan umum Daerah.

BAB IX PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 9

- (1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Terhadap Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang.
- (3) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024.

BAB X PELAPORAN

Pasal 10

Laporan PKPT terdiri dari:

- a. pokok-pokok hasil pemeriksaan; dan
- b. LHP dalam bentuk Bab dan Surat.

BAB XI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut LHP adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek Pemeriksaan.

REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI

- (2) Tindak lanjut hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh objek Pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB XII KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 12

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, inspektur jenderal kemendagri, Inspektorat provinsi atau lembaga pengawas fungsional lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, PKPT dan pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

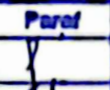
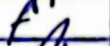
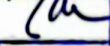
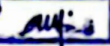
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KEPALA KPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKIP PERUM	PARAF KABIDKABAG SIPD	PARAF KABIDKASIPD
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten VII/III	
Kepala SKPD	
Kabag Mukam	

Ditetapkan di Pelayhari
pada Tanggal

Pj. BUPATI TANAH LAUT


SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR

															LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT				
															NOMOR :		TAHUN 2024		
															TANGGAL :				
No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obyek	Jenis Kegiatan	Tahun	Sesuan Tim		HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Perjalanan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
						Hari	Orang					Tarif	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Penyusunan PKPT	Assurance	Inspektorat	Perencanaan	2024	1	WPJ	4	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 2		5	10			Tinggi	Semua Irban	2 s/d 5 Januari 2024	
						1	KT												
						8	AT												
2	Penyusunan PPBR	Assurance	Inspektorat	Perencanaan	2023	1	WPJ	5	Bulan Januari Minggu ke - 2	Bulan Januari Minggu ke - 2		5	10			Tinggi	Tim Gabungan	2 s/d 12 Januari 2024	
						1	KT										Ketua : Made Ardika Uddiani, SE		
						8	AT										Anggota : Kasmiatun, S.STP, Tri Prapti Setyarini, SE, Nurlaila, SE, M. Alfian, S.Kom. MM, Eka Minna Arianty, SE, Soraya Azmah, SE, Achmad Riyandi, SE, Alfin Syahrinal Adha, SE, Dewi Arifana, S. Ak, M. Fikri Haykal, S. Kom		
3	Evaluasi RB TW IV Tahun 2023 on-going	Assurance	Seluruh SKPD	Evaluasi	2024	1	WPJ	5	Bulan Januari 2024 minggu ke 1	Bulan Januari 2024 minggu ke 2		5	12			Tinggi	Tim Gabungan	2 s/d 8 Januari 2024	
																	PJ : Dra. Joko wuryanto WPJ : Ina Gantiani PT : Nurhidayati KT : Kasmiatun		
																	AT : Herviana Amelia, Nurlaila, Irma Andriani, M. Agnes Hendriyanto, Yunistriana, Rina Kusriani, Febriyanti, Alfin Syahrinal Adha, Khairunnisa		
4	Reviu DAK Pemugasan Tahap III	Assurance	Dinas P2KBPSA	Reviu	2023	1	WPJ	3	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 1		3	8			Sedang	Irban II Drs. H. Amirul Wafa	2 s/d 3 Januari 2024	
						1	KT										Sumarta Dipura		
						6	AT										Evy Sofiyati		
5	Monitoring Inflasi	Assurance	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut dan Diskopdag Kab. Tanah Laut	Monitoring	2024	1	PJ	5	bulan Jan minggu ke - 1	Bulan Des minggu ke 4		5	9			Tinggi	Irban III	2 Januari s/d 31 Desember 2024	
						1	WPJ										Wakil Pemangung Jawab : Hj. Dwi Laksmine Yunika, ST, MT		
						1	KT										Anggota : Gilang Setria, S. IP, M. Khamdan Rosyid, SE		
						7	AT												
6	Reviu DAK (Subbid Kegiatan Pemurutan AKI dan Intervensi Stunting)	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2023	1	WPJ	2	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 2		2	3			Sedang	Irban II Drs. H. Amirul Wafa	4 Jan s/d 5 Jan 2024	
						1	KT										Sumarta Dipura		
						1	AT										Yunistriana		
7	ATT Kegiatan Pembangunan Perang (Slok di Dinas Perhubungan)	Assurance	Dinas Perhubungan	ATT	2023	1	PJ	18	minggu 2 Januari	minggu ke 4 Januari		18				Tinggi	Irban 5	8 s/d 31 Januari 2024	
						1	WPJ					18					Pengendali Teknis : Hj. Rusmanti, MM		

PARAF KEPALA SKPD PA KABAG HUMUM PERANG PER KANDI KABAG SKPD KASMAS

31	Berita Laporan Keuangan RELEAS	Assurance	RS KCI, Medivest	Berita	2023	1	WTU	5	Dalam Januari Minggu ke 4	Dalam Januari Minggu ke 5	3	3	180.000	2.700.000			AT	Keuntungan, Berita Kuala, Urus Andriani, Albi, Subhan Albi, Cherwinna	24 Jan s.d 30 Jan 2024
32	Berita Laporan Keuangan RELEAS	Assurance	UPF, Laboratorium Kamban	Berita	2023	1	WTU	6	Dalam Januari Minggu ke 4	Dalam Januari Minggu ke 5	5	5					AT	Suara Dapur G. Rany, Sany A, Irv B, Yudiantama, A Riyandi, Saha A	20 Jan s.d 31 Jan 2024
33	Berita Laporan Keuangan RELEAS	Assurance	UPFT, PSM Kaki Kaki	Berita	2023	1	PJ	5	Dalam Januari Minggu ke 4	Dalam Februari Minggu ke 2	3	3	180.000	2.700.000			AT	Urus IV Urus I Urus II, Urus H, Anwar Widi	25 s.d 31 Jan 2024
34	Berita Laporan Keuangan RELEAS	Assurance	UPFT, PSM Tambang Cikang	Berita	2023	1	PJ	5	Dalam Januari Minggu ke 4	Dalam Februari Minggu ke 2	3	3	125.000	1.875.000			AT	Urus IV Urus I Urus II, Urus H, Anwar Widi	25 s.d 31 Jan 2024
35	Berita Laporan Keuangan RELEAS	Assurance	Pudomanas Jombang	Berita	2024	1	WTU	5	Dalam Januari Minggu ke 5	Dalam Januari Minggu ke 5	3	3	130.000	1.170.000			AT	Urus I Keuntungan, Berita Kuala, Urus Andriani, Albi, Subhan Albi, Cherwinna	29 Januari s.d 7 Februari 2024
36	Berita Laporan Keuangan RELEAS	Assurance	Pudomanas Tebluhari Kic, Tebluhari	Berita	2023	1	PJ	5	Dalam Feb Minggu 1	Dalam Februari Minggu 4	3	3					AT	Urus III Keuntungan, Berita Kuala, Urus Andriani, Albi, Subhan Albi, Cherwinna	1 Feb s.d 29 Feb 2024
37	Berita Laporan Keuangan RELEAS	Assurance	Pudomanas Sari Bumi Kic, Tebluhari	Berita	2023	1	PJ	5	Dalam Feb Minggu 1	Dalam Februari Minggu 4	3	3					AT	Urus III Keuntungan, Berita Kuala, Urus Andriani, Albi, Subhan Albi, Cherwinna	1 Feb s.d 29 Feb 2024

KEP-1 BERITA	KEP-2 BERITA	KEP-3 BERITA	KEP-4 BERITA	KEP-5 BERITA	KEP-6 BERITA	KEP-7 BERITA	KEP-8 BERITA	KEP-9 BERITA	KEP-10 BERITA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

45	Penelitian/audit SAKIP	Assurance	entitas SKPD	Programme Lainnya	2024	1 WFU 1 KT 7 AT	8	Bulan Maret Minggu ke 1	Bulan Maret Minggu ke 2	8	27							Nawang Dalila, Tri Prayogi S, Siamet Mujiono, Doro Waluyo, Rizka Kusanti, Dewi Ardiana	9 s.d 9 Februari 2024	
46	Audit Penghasilan Desa BCB 1	Assurance	UPPD SMPN 1 Kumpang	Audit	2023	1 WFU 1 KT 6 AT	5	Bulan Februari Minggu ke 1	Bulan Februari Minggu ke 2	5	6								Irfan H, Drs. H. Anwar Wala	12 s.d 16 Februari 2024
47	Audit Penghasilan Desa BCB	Assurance	UPPD SMPN 1 Kumpang	Audit	2023	1 WFU 1 KT 6 AT	5	Bulan Februari Minggu ke 1	Bulan Februari Minggu ke 2	5	6								Irfan H, Drs. H. Anwar Wala	12 s.d 16 Februari 2024
48	Revisi Laporan Keuangan BLUD	Assurance	Pusatman Tanjung Haluis	Revisi	2024	1 WFU 1 KT 7 AT	5	Bulan Februari Minggu ke 3	Bulan Februari Minggu ke 2	3	5	119.000	1.600.000						Irfan I	14 s.d 20 Februari 2024
49	Tranasken awal desa Kumpang Baru 1 (Lanjutan)	Assurance	Desa Kumpang Baru	ATT	2021 dan	1 FU 1 WFU 1 PT 1 KT 5 AT	11	minggu ke 2	minggu ke 4	11									Irfan S	15 s.d 29 Februari
50	Audit Penghasilan Desa BCB 2	Assurance	UPPD SMPN 1 Pampayan	Audit	2023	1 WFU 1 KT 6 AT	5	Bulan Februari Minggu ke 3	Bulan Februari Minggu ke 4	5	8								Irfan H, Drs. H. Anwar Wala	19 Februari s.d 23 Februari 2024
51	Revisi Laporan Keuangan BLUD	Assurance	Pusatman Pajang Luar	Revisi	2024	1 WFU 1 KT 7 AT	5	Bulan Februari Minggu ke 4	Bulan Februari Minggu ke 2	3	5	130.000	1.900.000						Irfan I	21 s.d 27 Februari 2024
52	Revisi LUPU	Assurance	Seluruh SKPD	Revisi	2024	1 WFU 1 KT	10	Bulan Februari Minggu ke 2	Bulan Maret minggu ke 1	10	10								Tas Galunggung	21 Februari s.d 06 Maret 2024

KEPALA DESA	KABAG HUKUM	KEPALA DESA	KABAG DESA	KABAG DESA

No	Nama UPPU	Amanat	Seluruh SKPD	Berita	2024	1	WFU	10	Bulan Maret minggu ke 1	Bulan Maret minggu ke-2	7	10	Tanggal	Tim Gabungan	21 Februari s/d 08 Maret 2024
33	Berita UPPU	Amanat	Seluruh SKPD	Berita	2024	1	WFU	10	Bulan Maret minggu ke 1	Bulan Maret minggu ke-2	7	10	Tanggal	Tim Gabungan	21 Februari s/d 08 Maret 2024
						1	KT							Ketua Tim Oliang Sabra, STP	
34	Berita UPPU	Amanat	Seluruh SKPD	Berita	2024	1	WFU	10	Bulan Februari minggu ke 3	Bulan Maret minggu ke-1	7	8	Tanggal	Tim Gabungan	21 Februari s/d 08 Maret 2024
						1	KT								
35	Berita HPS Rincian Jalan Makasar Dulu Tahunan Lanyutan	Amanat	DPUPRP	Berita	2024	1	WFU	3	Bulan Februari Minggu ke 4	Bulan Maret Minggu ke 3	5	8	Tanggal	Tim Gabungan	23 Februari s/d 9 Maret 2024
						1	KT								
						7	AT								
36	Berita HPS 1	Amanat	UKPEU	Berita	2024	1	WFU	3	Bulan Juni Minggu ke 2	Bulan Februari Minggu ke 2	3	7	Senin	Irwan D, Elm H, Amrul Wala	26 Februari s/d 28 Februari 2024
						1	KT							Nuzaria Dipura	
						5	AT							Gk. Remy, Sawa A, Elm S, Yusathiana, A. Riyandi, Saiza A.	
37	Berita HPS Pengujian Tinggi Dena Lanyutan Ases	Amanat	DPUPRP	Berita	2024	1	FU	3	ases permulaan SKPD	5 hari setelah permulaan revisi	3	8	Tanggal	Irwan IV	26 Februari s/d 28 Februari 2024
						1	WFU							FU: Joko Wurnanto	
						1	PT							WFU: Ika Gernitas	
						1	KT							PT: Nurhidayah	
						7	AT							KT: B. Agus Brodaryanto	
														AT: Kusdaman, Hermiana Amelia, Irma Andriani, Adin Syahrial Adha, Chairunnisa	
38	Berita HPS Peningkatan Pedestrian RTN Singren H. Hasan Dwart	Amanat	DPRKPLH	Berita	2024	1	FU	3	ases permulaan SKPD	5 hari setelah permulaan revisi	3	8	Tanggal	Irwan IV	26 Februari s/d 28 Februari 2024
						1	WFU							FU: Joko Wurnanto	
						1	PT							WFU: Ika Gernitas	
						1	KT							PT: Nurhidayah	
						7	AT							KT: B. Agus Brodaryanto	
														AT: Kusdaman, Hermiana Amelia, Irma Andriani, Adin Syahrial Adha, Chairunnisa	
39	Berita Laporan kemajuan SKPD	Amanat	Puskemas Tirta Jaya	Berita	2024	1	WFU	5	Bulan Februari Minggu ke 5	Bulan Februari Minggu ke 2	3	5	Senin	Irwan I	28 Februari s/d 6 Maret 2024
						1	KT								
						7	AT							Iris Bahari, ST	

PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KETUA BPPD	KABANG HUKUM	KEHUKUM HUKUM	KABANG HUKUM BPPD	KABANG HUKUM BPPD

No	Revisi KRPD Tahun 2023	Assurance	Seluruh KRPD	Revisi	2024	1	WFU	3	Bulan April Minggu ke 3	Bulan April Minggu ke 4	5	23				Nawang (Bulani, Ti Prigati S. Doro Wahyuni, Rina Kusuma, Dewi Arifiana)	6 s/d 19 Juni 2024
88	Revisi KRPD Tahun 2023	Assurance	Seluruh KRPD	Revisi	2024	1	WFU	3	Bulan April Minggu ke 3	Bulan April Minggu ke 4	5	23				Tim Gabungan	6 s/d 19 Juni 2024
89	Evaluasi ZI	Assurance	KRPD yang dicantumkan (15)	evaluasi	2023	1	FU	15	minggu ke 3 mei	minggu ke 1 juni	15					Tim Gabungan Ibhan S Pengabdai Teknis: HJ. Rusmali, MM Ketua Tim: Yandi, S.AP Anggota: Tony Nurwulan, S.Si, MM, Alimuddin, S.Pi, MM, Arsy Yumarty, SE, AK, Febrijanti, S. Akun dan Muhammad Arif, S. Kom	20 Mei s/d 7 Juni 2024
90	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Pandahan Kec. Bati-Bati	Audit	2023	1	FU	20	Bulan Mei Minggu ke 4	Bulan Juni Minggu ke 2	5	7	180.000	6.300.000		Ibhan IV FU: Joko Wuryanto WFU: Ima Cahyani PT: Nurhidayah KT: Harviana Amalia AT: Alfin Syahrinal Adha, Khairunnisa	27 Mei s/d 7 Juni 2024
91	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Ujung Batu Kec. Bati-Bati	Audit	2023	1	FU	20	Bulan Mei Minggu ke 4	Bulan Juni Minggu ke 2	5	7	180.000	6.300.000		Ibhan IV FU: Joko Wuryanto WFU: Ima Cahyani PT: Nurhidayah KT: Rasmiana AT: Ima Andriani, M. Agnes Handayani	27 Mei s/d 7 Juni 2024
92	Revisi KRPD Perubahan 2024	Assurance	Seluruh KRPD	Revisi	2024	1	WFU	5	Bulan Mei Minggu ke 4	Bulan Juni Minggu ke 1	5	36				Tim Gabungan	27 Mei s/d 3 Juni 2024
93	Revisi DAK PAUD (Kontrak)	Assurance	Disnaw Pendidikan dan Kebudayaan	Revisi	2024	1	FU	5	Bulan Juni minggu ke 1	Bulan Juni minggu ke 2	5	3				Ibhan III Ketua: Barulata, SS Anggota: Mujalich, S.Pi, M. Filley Haykal, S. Kom	3 s/d 7 Juni 2024
94	Revisi DAK SD (Kontrak)	Assurance	Disnaw Pendidikan dan Kebudayaan	Revisi	2024	1	FU	5	Bulan Juni minggu ke 1	Bulan Juni minggu ke 2	5	3				Ibhan III Ketua: Barulata, SS Anggota: HJ. Rusmali, S. Doro MS, Rivaldi Saputra, ST	3 s/d 7 Juni 2024
95	Revisi DAK SMP (Kontrak)	Assurance	Disnaw Pendidikan dan Kebudayaan	Revisi	2024	1	FU	5	Bulan Juni minggu ke 1	Bulan Juni minggu ke 2	5	3				Ibhan III Ketua: Barulata, SS	3 s/d 7 Juni 2024

PRUP KEPALA DPKD	PRUP KABAG HUKUM	PRUP PETINJAU PERUB KABAGURAH DPKD	PRUP KABAGURAH DPKD	TUKAS KABAGURAH DPKD

105	Penyusunan Anggaran Cemara	Assurance	SKPD	Penyusunan	2024	1 1 7	KT KT AT	10	Bulan September Minggu ke 4	Bulan September Minggu ke 5	5	8					Redang	Urban II, Gt. Rany Subarna Dipura Surya A, Ety S. Yudiantono, A. Etiandi, Sula A	23 s/d 30 September 2024
106	Monitoring P3LR	Assurance	seluruh SKPD	Evaluasi	2024	1 1 7	KT WFJ AT	3	Bulan Juni Minggu ke 4	Bulan Juni Minggu ke 5	3	9					Redang	Yan Urban I Samet Mujiono, S.STP Nawang Sulhadi, Tri Prapti S. Doro Wahyuni, Riza Kusriani, Dewi Ardianna	20 s/d 26 Juni 2024
107	Proyek Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak Cemara Kaster Alimata dan Workshop Alimata	Assurance	DPUKRP	Audit	2024	1 1 1	FJ WFJ KT	180	Bulan Juni Minggu ke 4	Bulan Desember Minggu ke 4	180	9					Tinggi	Urban II Karna Bayuli Supena, ST Auggita H, Ruzman, S. Sen, M. S. Mardiana, Lufiana, SE, Nurhalla, SE, Glang Glang, S. D, Muliadi, Spd, M. Khumala, Ruzmit, SE, M. Filary Harah, S. Rini	24 Juni s/d 31 Desember 2024
108	Proyek Audit pembangunan program marga Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur tahap pelaksanaan	Assurance	seluruh kecamatan	Audit	2024	1 5	WFJ AT	10	Sesuai jadwal kontrak	Sesuai jadwal kontrak	10	9					Tinggi	Urban IV FJ Jaka Wicakana WFJ Ika Gendari PT Nurhidayah KT S. Agnes Hendarjanto KT Kusumawati, Hermina Amelia, Irena Andriani, Adis Dwiandri Adha, Kharismasari	Sesuai jadwal kontrak
109	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Sebahman Baru	Evaluasi	2024	1 1 7	WFJ KT AT	10	Bulan Juli Minggu ke 1	Bulan Juli Minggu ke 3	10	8					Tinggi	Urban II, Gt. Rany Subarna Dipura Surya A, Ety S. Yudiantono, A. Etiandi, Sula A	1 Juli s/d 12 Juli 2024
110	monitoring RTP IIR TW II	Assurance	Seluruh SKPD	monitoring	2024	1 1 10	WFJ KT AT	9	Bulan Juli 2024 Minggu ke 1	Bulan Juli 2024 Minggu ke 2	5	12					Tinggi	Urban I, II, III dan IV	1 s/d 8 Juli 2024
111	Audit Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Assurance	Desa Swarangan Kec. Jering	Audit Kinerja	2024	1 1 7	WFJ KT AT	10	Bulan Juli Minggu ke 1	Bulan Juli Minggu ke 5	10	8	130.000	1.040.000			Tinggi	Urban I Samet Mujiono, S.STP	18 s/d 31 Juli 2024

PARIP KORLA/ENPO	PARIP KAB/KANTON/KOTA	PARIP KANTON	PARIP KABUPATEN/DAERAH OTOT	TAMBAH KANTON
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

120	Rencana DAK SD TASPAP I	Assurance	Dimutakhir (SD Taspap I)	Rencana	2024	1 1 1	FJ WFJ KT	3	Bulan Juli minggu ke 2	Bulan Juli minggu ke 3	5	3	Tinggi	<p>Wening Dediarta, Tri Prasetyo S, Slamet Mujiono, Elva Kusuma, Dewi Ardiyana</p> <p>Urban II Kertus Barbala, SE Anggita HJ, Fiumani, S, Sus, M, S, Herardi Suputra, ST</p>	29 Juli s/d 30 Juli 2024
121	Rencana DAK PAUD TASPAP I	Assurance	Dimutakhir (PAUD Taspap I)	Rencana	2024	1 1 1	FJ WFJ KT	3	Bulan Juli minggu ke 4	Bulan Juli minggu ke 5	5	3	Tinggi	<p>Urban II Kertus Barbala, SE Anggita Muliaha, Spd, M, Fikry Haykal, S, Kim</p>	29 Juli s/d 31 Juli 2024
122	Rencana DAK SMP TASPAP I	Assurance	Dimutakhir (SMP Taspap I)	Rencana	2024	1 1 1	FJ WFJ KT	3	Bulan Juli minggu ke 4	Bulan Juli minggu ke 5	5	3	Tinggi	<p>Urban II Kertus Barbala, SE Anggita Mulya Ardiyana Urdiana, SE, M, Khamsan Riyadi, SE</p>	29 Juli s/d 31 Juli 2024
123	Rencana DAK Bidang pendidikan Tahap I	Assurance	Dimutakhir (Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)	Rencana	2024	1 1 1	FJ WFJ KT	3	Bulan Agustus minggu ke 1	Bulan Agustus minggu ke 2	5	4	Tinggi	<p>Urban II Kertus Endo Ardika Dediarta, SE Anggita HJ, Fiumani, S, Sus, M, S, Barbala, SE, Gibang Setra, S, IP, Herardi Suputra, ST, Muliaha, Spd, M, Khamsan Riyadi, SE, M, Fikry</p>	1 s/d 12 Agustus 2024
124	Rencana DAK Penggajian PPPK tahap II	Assurance	BPKAD	Rencana	2024	1 1 6	WFJ KT AT	2	Bulan Agustus Minggu ke 1	Bulan Agustus Minggu ke 1	2	3	Sedang	<p>Urban II</p>	1 s/d 12 Agustus 2024
125	Rencana DAK Bidang Sisk tahap II	Assurance	DPPUSP	Rencana	2024	1 1 6	WFJ KT AT	2	Bulan Agustus Minggu ke 1	Bulan Agustus Minggu ke 1	2	3	Sedang	<p>Urban I Kertus Tim: Dora Wahyuni Anggita Tim: Wening Dediarta, Tri Prasetyo S, Slamet Mujiono, Elva Kusuma, Dewi Ardiyana,</p>	1 s/d 12 Agustus 2024
126	Rencana DAK Tahap II	Assurance	Dimutakhir	Rencana	2024	1 1 7	WFJ KT AT	3	Bulan Agustus Minggu ke 1	Bulan Agustus Minggu ke 2	5	3	Sedang	<p>Urban II, Gk, Rany Subarta Dignara Sarasa A, Eri S, Yansatriana, A, Herardi, Setra A</p>	1 Agustus s/d 12 Agustus 2024
127	Audit Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa	Assurance	Desa Mikaranti	Audit	2023	1 1 7	WFJ KT AT	10	Bulan Agustus Minggu ke 2	Bulan Agustus Minggu ke 4	10	6	Tinggi	<p>Urban II, Gk, Rany Subarta Dignara Sarasa A, Eri S, Yansatriana, A, Herardi, Setra A</p>	5 Agustus s/d 30 Agustus 2024
128	Audit Laporan Tertentu	Assurance	Desa Kurunglit	ATT	2024	1 1	FJ WFJ	10	minggu ke 2 bulan Agustus	minggu ke 3 Agustus	10	10	Tinggi	<p>Urban II</p>	5 s/d 19 Agustus 2024

PARAF KEPALA BIDANG	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT DAERAH	PARAF MANAJEMEN DATA	PARAF LAINNYA

138	Audit Perencanaan Usaha	Assurance	SEPTA Widyaiswara kelas II	Semua	2023	1	WU	13	13	0					Tinggi	Uman G. G. Rasy	11 s.d 29 Desember 2024
						1	KT									Subarta Dipay	
						1	KT									Sarwa A. Dhy S. Yudiantono, A. Riyandi, Satrio A.	
139	Monitoring UJUK	Assurance	sempurna SEPTA	Monitoring	2024	1	WU	3	3	0					Setengah	Uman I	16 s.d 20 Desember 2024
						1	WU									Edward Mujiono, S.P.TP	
						1	KT									Nawang Sulistyanto, Tri Prastika S. Sam, Wahyuni, Elva Kusriati, Dewi Ardiana	
						1	KT										
140	Uji Coba UAK No. Momen Tahun II Tahun 2024	Assurance	LUPUNP	Semua	2024	1	WU	3	3	2					Setengah	Uman I	18 s.d 20 November 2024
						1	KT									Tri Prastika Setyawan, SS	
						1	KT									Elva Kusriati	
141	Audit Keberhasilan	Assurance	3 persentasi keberhasilannya	Audit	2024	1	WU	10	10	10					Tinggi	Uman I	1 s.d 15 Desember 2024
						1	KT									Tri Prastika Setyawan, SS	
						1	KT									Nawang Sulistyanto, Tri Prastika S. Sam, Wahyuni, Elva Kusriati, Dewi Ardiana	
142	Uji Coba UAK Tahun II PAUD	Assurance	Uman Pendidikan dan Keefektifan	Semua	2024	1	WU	5	5	3					Tinggi	Uman II	4 s.d 10 Desember 2024
						1	WU									Uman Pendidikan, SS	
						1	KT									Agung Muliadi, Tri M. Fikri Hartono, S. Sam	
						2	KT										
143	Uji Coba UAK Tahun II SD	Assurance	Uman Pendidikan dan Keefektifan	Semua	2024	1	WU	5	5	3					Tinggi	Uman II	4 s.d 10 Desember 2024
						1	WU									Uman Pendidikan, SS	
						1	KT									Agung Muliadi, Tri M. Fikri Hartono, S. Sam, M. S. Ahmad Supriyo	
						2	KT										
144	Analisis Perencanaan Anggaran PBI Th. IV	Assurance	SEPTA	Semua	2024	1	WU	10	10	12					Setengah	Uman II	4 s.d 17 Desember 2024
						1	WU									Tim Gabungan	
						1	KT									ST. Nurhuda Ananda	
						1	KT										
						2	KT										
145	Audit Keberhasilan Uman	Assurance	Uman Hasil Survei dan Hasil Makmur	Audit	2023	1	WU	10	10	10	140.000				Tinggi	Uman II	1 s.d 18 Desember 2024
						1	WU									Uman Pendidikan, SS	
						1	KT									Agung Muliadi, Tri M. Fikri Hartono, S. Sam, M. S. Ahmad Supriyo, Nawa Sulistyanto, SS, Elang, Nawa Sulistyanto, Tri M. Fikri Hartono, S. Sam, M. S. Ahmad Supriyo, SS, M. Fikri Hartono, S. Sam	
						1	KT										
						2	KT										
146	Uji Coba UAK Tahun II SMP	Assurance	Uman Pendidikan dan Keefektifan	Semua	2024	1	WU	5	5	3					Tinggi	Uman II	11 s.d 17 Desember 2024
						1	WU									Uman Pendidikan, SS	
						1	KT									Agung Muliadi, Tri M. Fikri Hartono, S. Sam, M. S. Ahmad Supriyo, SS	
						2	KT										
147	Uji Coba UAK Pengujian UJUK	Assurance	SPKAD	Semua	2024	1	WU	2	2	2					Setengah	Uman I	Setengah Uman
						1	KT									Edward Mujiono, S.P.TP	
						1	KT									Nawang Sulistyanto, Tri Prastika S. Sam, Wahyuni, Elva Kusriati, Dewi Ardiana	




Handwritten signatures and initials in a grid format, likely for administrative approval or verification.

1569	Demas (DAN) Keliling Desa	Ambulance	UPC/PPK	Demas	2024	1 WPU 1 ST 7 AT	2	Demas Pertemuan	Demas Pertemuan	2					Demas	Uban 1 Kerem Tim: Bero Wahyu Anggoro Tim: Harung Halwadi, Tri Prasetyo S, Giaman Mijang, Irena Kusuma, Dima Ardiana, Nural Hidayah	Demas Perencanaan
1570	Monitoring RT/R RW TW TU	Ambulance	Demas SKPD	Monitoring	2024	1 WPU 1 ST AT	5	Uban Desember Minggu ke 1	Uban Desember Minggu ke 2	5	12			Demas	Tim Gathungin	1 s.d 5 Desember 2024	
1571	Pemantauan KAN	Ambulance	Demas SKPD	Pemantauan	2024	4 WPU 4 ST 25 AT	5	Uban Desember Minggu ke 4	Uban Desember Minggu ke 5					Tungg	Uban 1: GURU	27 s.d 31 Desember 2024	

PJ BUPATI BUKAH LAUT



SYARIF RAHMAN

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten III/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	